

PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

Muhammad Egi Akbar Sudarto^{*1}, Moh. Rusman Ramli²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Buton,
Baubau, Indonesia

e-mail: titatalaga96@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Jumlah responden pada penelitian ini adalah sebanyak 93 responden yang terdiri dari 31 organisasi pemerintah daerah (OPD). Masing-masing OPD memiliki 3 responden dan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan memperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, dengan koefisien regresi yang bertanda positif yaitu 0,540, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif. Pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, didapatkan dengan hasilkan bertanda positif yaitu dengan nilai 0,427, hal tersebut memiliki arti pengaruh yang positif.

Kata kunci : kinerja instansi, dan kualitas laporan keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of public sector accounting and internal supervision on the performance of local government agencies in the Buton Tengah Regency Government. In this study, the method used is the quantitative descriptive analysis method. The data collection method is carried out by distributing questionnaires. The number of respondents in this study was 93 respondents consisting of 31 local government organizations (OPD). Each OPD has 3 respondents and is processed using the SPSS application. Based on the results of the tests that have been carried out in this study and obtained a significant value of $0.000 < 0.05$, with a positive regression coefficient of 0.540, so it can be concluded that the implementation of public sector accounting has an effect on the performance of local government agencies and has a positive effect. Internal supervision has an effect on the performance of local government agencies, obtained with a positive result, namely with a value of 0.427, this means a positive effect.

Keywords: Agency performance, and quality of financial reports.

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh suatu negara merupakan suatu faktor yang penting dalam kemajuan suatu negara. Dengan diterapkannya suatu pemerintahan yang baik maka potensi-potensi yang ada di negara tersebut dapat dikembangkan secara maksimal dan efisien demi memajukan negara tersebut (Dharmawan dan Supriatna, 2016).

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat terutama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut (Salamah, 2020).

Haryanto, dkk (2017) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan, baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien

Penelitian yang dilakukan oleh Tadjudinsyah dan Fitria (2023), membuktikan secara empiris bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengadakan suatu pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Ikrami, 2021).

Kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis karena saat ini perbaikan kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik.

Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton Tengah memiliki 31 organisasi pemerintah daerah (OPD), yang sudah sepatutnya bahwa organisasi-organisasi tersebut telah menerapkan akuntansi sektor publik, dan 5 menjadi hal yang sangat wajar apabila memiliki pengawasan internal untuk seluruh organisasi pemerintah daerah tersebut.

Pemaparan latar belakang di atas memperlihatkan beberapa perbedaan kesimpulan terkait penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, sehingga peneliti ingin mengetahui dan membuktikan apabila variabel penerapan akuntansi sektor publik dan variabel pengawasan internal tersebut diteliti di Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, apakah variabel-variabel tersebut mendapatkan hasil

yang berpengaruh atau tidak berpengaruh, sehingga dengan adanya gap penelitian yang telah ditunjukkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Halim dan Kusufi (2018) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihakpihak yang memerlukan.

Menurut Mahendra (2022:23), indikator yang digunakan untuk mengukur akuntansi sektor publik terdiri dari pencatatan transaksi, ketepatan waktu pelaporan dan keandalan laporan keuangan.

1. Pencatatan transaksi. Transaksi dicatat secara relevan sesuai dengan apa yang terjadi dan dapat diandalkan.
2. Ketepatan waktu pelaporan. Laporan keuangan dilaporkan sesuai dengan standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
3. Keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan bersifat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai alat informasi dalam pengambilan keputusan.

Pengawasan Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menyebutkan bahwa pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Indikator pengawasan internal dapat dipaparkan sebagai berikut (Wijaya, 2017:9):

1. Lingkungan pengendalian. Unsur sistem pengendalian intern yang pertama adalah lingkungan pengendalian yang diwujudkan melalui penegakan integritas dan etika, pendegelasan wewenang dan tanggungjawab yang tepat, serta struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Penilaian risiko. Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan yang diwujudkan melalui identifikasi risiko dan analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi

pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko, dilakukan melalui pengendalian fisik asset dan pencatatan dan dokumentasi.

Pemantauan pengendalian intern. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Kinerja Instansi Pemerintah

Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 2015:67). Menurut Mulyadi (2015:63) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan menurut Sutrisno (2015:151) prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Kinerja instansi pemerintah dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut (Mahendra, 2022:25):

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Input sebagai langkah awal dari penyusunan indikator kinerja pemerintah dimulai dari rencana program tahunan, dalam penentuan kegiatan pemerintah memerlukan data dan informasi serta setiap pegawai memiliki kemampuan yang handal. Perencanaan awal melihat bagaimana cara mencapai suatu tujuan.
2. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. Penerapan indikator output merefleksikan bagaimana organisasi melihat kejelasan dan ketelitian pegawai dalam melaksanakan program kerja, serta memaparkan seberapa besar rencana berhasil dilaksanakan.
3. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil dari suatu perencanaan diharapkan dapat menilai kualitas hasil program kerja yang sesuai dengan sasaran dan tujuan.

Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Peningkatan pengendalian dalam pelaksanaan program akan menjamin pola pertanggungjawaban di organisasi. Penetapan indikator impact menentukan kinerja pelaksanaan program yang lebih baik dan kompeten

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD Kabupaten Buton Tengah yang berjumlah 31 OPD, yang terdiri dari 25 dinas dan 6 badan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kualitatif dan Data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yang telah

mengisis kuesioner. Data sekunder, yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal penelitian dan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa metode yaitu: Observasi, Kuesioner, Dokumentasi Studi pustaka Teknik Analisis Data digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif . Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Persamaan Linier Berganda

Tabel 1 Hasil Regresi Linear Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	6.877	2.651		2.594
	X_Sistem_Pemb_QR_Code	.540	.116	.401	4.644
	X2_Pengawasan Internal	.427	.081	.452	5.238
a. Dependent Variable: Y_Kinerja_Instansi_Pemda					

Sumber data diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y = 6,877 + 0,540X_1 + 0,427X_2$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar 6,877, ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen (penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal) bernilai 0 maka nilai variabel dependen (kinerja instansi pemerintah daerah) sebesar 6,877.
2. Koefisien regresi penerapan akuntansi sektor publik adalah 0,540 dan bertanda positif. Hal ini berarti jika nilai penerapan akuntansi sektor publik mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka kinerja instansi pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,540.
3. Koefisien regresi pengawasan internal adalah 0,427 dan bertanda positif. Hal ini berarti jika nilai pengawasan internal mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka kinerja instansi pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,427.

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (uji-t) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Parsial

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	6.877	2.651		2.594	.011
	X1_Penerapan_ASP	.540	.116	.401	4.644	.000
	X2_Pengawasan_Intenal	.427	.081	.452	5.238	.000

a. Dependent Variable: Y_Kinerja_Instance_Pemda

Sumber: data diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas yang merupakan tabel hasil uji parsial, maka dapat dilihat bahwa:

1. Variabel penerapan akuntansi sektor publik (X1) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis (H1) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik (X1) berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y).
2. Variabel pengawasan internal (X2) memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis (H2) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan internal (X2) berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y).

Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Uji simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Dengan ketentuan, jika nilai sig.

Tabel 3. Hasil Uji Simultan

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	549.608	2	274.804	64.930	.000 ^b
	Residual	380.909	90	4.232		
	Total	930.516	92			

a. Dependent Variable: Y_Kinerja_Instance_Pemda

b. Predictors: (Constant), X2_Pengawasan_Intenal, X1_Penerapan_ASP

Sumber: data diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik (X1) dan pengawasan internal (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.769a	.591	.582	2.057

a. Predictors: (Constant), X2_Pengawasan_Intenal, X1_Penerapan_ASP

b. Variable: Y_Tingkat_Efek_Pelayanan_Op

Sumber data diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0,582 atau 58,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja instansi pemerintah daerah dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel penerapan akuntansi sektor publik dan variabel pengawasan internal sebesar 58,2%, sedangkan sisanya 41,8% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah. Adapun masing-masing pengaruh variabel, dapat dilihat sebagai berikut:

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima, yang artinya bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima, yang artinya pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien regresi bertanda positif.

Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Secara Simultan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima semua variabel yang digunakan di dalam penelitian ini yang terdiri atas penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dan memperoleh Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, didapatkan dengan hasilkan bertanda positif yaitu dengan nilai 0,540, hal tersebut memiliki arti pengaruh yang dihasilkan merupakan pengaruh yang positif. Pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, didapatkan dengan hasilkan bertanda positif yaitu dengan nilai 0,427, hal tersebut memiliki arti pengaruh yang dihasilkan merupakan pengaruh yang positif. Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, yang dilihat dari nilai signifikansi hasil uji simultan yaitu dengan nilai $0,000 < 0,05$.

6. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengaruh Penerapan akuntansi sektor publik dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah disarankan agar selalu mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan dalam mengembangkan kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah atau menguji variabel-variabel dan indikator-indikator yang lain sebagai pengembangan dari penelitian ini.
3. Bagi akademis disarankan agar penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi tambahan dalam melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. In: *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Terbuka: Jakarta.
- Biduri, Sarwenda. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Dharmawan, Taufan dan Nono Supriatna. 2016. Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, Vol.4, No.1, Hal.941-948). Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* Edisi 10. UNDIP Press: Semarang.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempah Ibadah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Haryanto; Sahmuddin dan Arifuddin. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ikrami, Fildzah. 2021. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Karlina, Neneng; Trisna Sary Lewaru dan Dwi Kriswantini. 2023. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Good Governance dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada OPD Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku*.
Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol.1, No.3, Hal. 300306. Universitas Pattimura. Ambon.
- Kementerian Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Mahendra, Ryan Aji. 2022. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mangkunegara. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mulyadi. 2015. *Implementasi Organisasi*. UGM Press: Yogyakarta.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Peilouw, Christian Timotius; Oktavia; Wulandari dan Latuan. 2023. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada BPKAD Kabupaten Kupang)*. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, Vol.5, No.1, Hal.111-122.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Jakarta

- Salamah, Nurhani. 2020. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor)*. Skripsi. Universitas Pakuan. Bogor.
- Sekaran, Uma. 2015. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sutrisno, Edy. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ketujuh*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Tadjudinsyah, Mohammad Alfren dan Astri Fitria. 2023. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.12, No.2, Hal.1-19
- Wijaya, Rian. 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Di Kabupaten Musi Banyuasin*. Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Yahya, Y. 2016. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu: Yogyakarta.